



**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
(DISNAKERTRANS)**

Jl. Pelabuhan II KM. 6 NO. 703 Telp/Fax. (0266) 226088  
Sukabumi 43169

email : [disnakertrans\\_kabsmi@yahoo.com](mailto:disnakertrans_kabsmi@yahoo.com)



## KATA PENGANTAR

Berkat ridho dan bimbingan Allah SWT, Alhamdulillah kami dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi untuk tahun 2021.

Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, atau sebagai arah dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi Periode 2016-2021 “ **Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri**”

Demikian Rencana Kerja Tahun 2021 ini dibuat untuk dipedomani oleh seluruh pegawai yang ada di jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur staf.

Sukabumi, 28 Agustus 2020

Kepala,  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sukabumi



**Ir. H. DADANG BUDIMAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630503 198803 1 008



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU</b> .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi .....	6
2.2. Analisi Kinerja Pelayanan .....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	22
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja	52



	dan Transmigrasi .....	
	3.3. Program dan Kegiatan .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>62</b>
	4.1. Tabel Rencana Kegiatan RKPD Online .....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>80</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, RPJM Provinsi Jawa Barat, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan



Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - l. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
  - m. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  - n. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021;
  - o. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 103 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Tahun 2021 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 yang telah mengakomodir usulan hasil Musrenbang dari tiap Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.



### 1.3.2. Tujuan

Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I      PEDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB II     HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi





- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

- 4.1. Tabel Rencana Kegiatan RKPD Online

**BAB V PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2019, capaian Rencana Kerja tahun 2020 dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Realisasi program/kegiatan tahun 2019 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan tahun 2019 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan tahun 2019 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Disnakertrans dan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :



**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA**  
**SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 01	Uraian Wajib Bulan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja									
2 01 01	Bidang Uraian Ketenagakerjaan									
2 01 01 01	<b>Program Pelayanan Administrasi</b>	<b>Cakupan Pelayanan Perkantoran</b>								
2 01 01 01 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	60 bulan	83
2 01 01 01 03	Pelayanan Administrasi Aset	Jumlah Aset yang dilayani	600 unit	300 Unit	100 unit	100 unit	100	100 unit	500 unit	83
2 01 01 02	<b>Proga Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana</b>								
2 01 01 02 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4	12 unit	1 Unit	- unit	- unit	-	- unit	1 unit	8
2 01 01 02 03	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	36 paket	6 paket	24 paket	24 paket	100	- paket	30 paket	83
2 01 01 02 05	Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 jenis	8 jenis	- jenis	- jenis	-	18 jenis	26 jenis	26
2 01 01 02 06	Pengadaan Perangkat Lunak Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 jenis	- jenis	25 jenis	25 jenis	100	- jenis	25 jenis	25
2 01 01 02 17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tempat Kerja yang nyaman	12 gedung	4 gedung	- gedung	- gedung	-	- gedung	4 gedung	33
2 01 01 02 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran dalam pelaksanaan tugas kedinasan	100 unit	28 unit	36 unit	36 unit	100	36 unit	100 unit	100
2 01 01 02 25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	200 unit	55 Unit	- unit	- unit	-	- unit	55 unit	28



Kode	Urusan/Bidang Urusan Peminatanaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kebijakan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renc. SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi 1 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6* 100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4* 100)
2 01 01 02 30	Rehabilitasi Gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 gedung	3 gedung	1 gedung	1 gedung	100	- gedung	4 gedung	33
2 01 01 02 34	Penataan Halaman Kantor	Meningkatnya Estetika Halaman Kantor	1.680 m2	- m2	137 m2	137 m2	100	- m2	137 m2	8
2 01 01 02 42	Penataan dan Penggamaan Arip	Meningkatnya Penataan dan Pengamanan Arip	300 buah	- buah	100 buah	100 buah	100	50 buah	150 buah	50
2 01 01 02 #	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	200 unit	- Unit	70 unit	70 unit	100	20 unit	90 unit	45
2 01 01 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>								
2 01 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian, Batik	97 stel	- stel	75 stel	75 stel	100	- stel	75 stel	77
2 01 01 03 05	Pengadaan Khusus Haci-haci Tertentu	Pakaian Adat Daerah/ Tradisional	150 stel	- stel	87 stel	87 stel	100	- stel	87 stel	58
2 01 01 05	<b>Program Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
2 01 01 05 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	150 orang	- orang	75 orang	75 orang	100	- orang	75 orang	50
2 01 01 05 04	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek/pelatihan	150 orang	- orang	- orang	- orang	-	- orang	- orang	-
2 01 01 05 26	Team Building/Outband dan Olahraga Rutin	Meningkatnya sumber daya aparatur	150 orang	91 orang	- orang	- orang	-	- orang	91 orang	61

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)	
2.01.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
2.01.01.06.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efisiensi Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dinas	54 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100	27 dokumen	50	
2.01.01.06.12	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Jumlah persediaan dan kebutuhan tenaga kerja pada sektor yang teridentifikasi	5 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	-	1 dokumen	17	
2.01.01.06.20	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Termonitornya pelaksanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	6 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	-	2 dokumen	33	
2.01.01.06.23	Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan	Cakupan pengelahan laporan SKPD	6 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	-	1 dokumen	17	
2.01.01.06.31	Forum Komunikasi SKPD	Cakupan pengelahan laporan SKPD	450 opd/kec	75 opd/kec	- opd/kec	- opd/kec	-	75 opd/kec	17	
2.01.01.06.32	Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan	Cakupan pengelahan laporan SKPD	840 orang	140 orang	- orang	- orang	-	140 orang	17	
2.01.01.06.33	Rapat Pengendalian Program Ketenagakerjaan	Cakupan pengelahan laporan SKPD	6 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	-	1 dokumen	17	
2.01.01.13	<b>Program Perbunan dan Pengembangan Kesemutan Kerja</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>								
2.01.01.13.02	Jobdir	Pencari Kerja yang terstap	120 perusahaan	30 perusahaan	40 perusahaan	40 perusahaan	100	60 perusahaan	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Prestasi Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)	
2 01 01 13	Dianutnisi Peraturan Ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman peserta tentang prosedur peraturan ketenagakerjaan	360 orang	- orang	30 orang	30 orang	100	90 orang	25	
2 01 01 13 07	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah masyarakat yang mengikuti pengembangan teknologi tepat guna	150 orang	20 orang	20 orang	100	- orang	40 orang	27	
2 01 01 13	Pengembangan Usaha Mandiri	wirausaha yang dibentuk	100 orang	- orang	- orang	-	- orang	- orang	-	
2 01 01 13 13	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah peserta pembekaban wirausaha	240 orang	40 orang	60 orang	100	20 orang	120 orang	50	
2 01 01 13 14	Perluasan Kemampuan Kerja	Mengurangi penganggur sementara	315 orang	88 orang	182 orang	100	88 orang	358 orang	114	
2 01 01 13 15	Pembinaan Bursa Kerja Khusus	Jumlah BKK yang terbina	60 bkk	60 bkk	60 bkk	100	- bkk	120 bkk	200	
2 01 01 13 16	Pembinaan Pelaksanaan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS)	Meningkatnya pembinaan tenaga kerja Indonesia swasta melalui PTKIS	180 orang	30 orang	- orang	-	- orang	30 orang	17	
2 01 01 13	Pelatihan Pemulangan TKI	Jumlah TKI yang bermasalah yang pulang ke wilayah kab. Sukabumi	48 orang	5 orang	8 orang	275	4 orang	31 orang	65	
2 01 01 13	Pembinaan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan	Tenaga kerja asing di sukabumi yang dibina	350 perusahaan	307 perusahaan	277 perusahaan	100	- perusahaan	584 perusahaan	167	
2 01 01 14	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja di wilayah kab. Sukabumi								
2 01 01 14 02	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	250 orang	120 orang	- orang	-	- orang	120 orang	48	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluasan Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Rencana SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2019	Realisasi Kinerja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana SKPD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100)	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)	
2.01.01.14	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Institusional	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	250 orang	- orang	160 orang	160 orang	100	160 orang	64	
2.01.01.14	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	250 orang	- orang	140 orang	140 orang	100	140 orang	56	
2.01.01.14.03	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat	250 orang	100 orang	160 orang	160 orang	100	260 orang	104	
2.01.01.14.04	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah LPK yang dibina	70 lpk	55 lpk	85 lpk	85 lpk	100	140 lpk	200	
2.01.01.15	<b>Program Peningkatan Penguasaan Lembaga Keterampilan</b>	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial								
2.01.01.15.01	Pembinaan Kasus Hubungan Industrial	Terselenggaranya kasus hubungan industrial	204 perusahaan	68 perusahaan	25 perusahaan	27 perusahaan	108	100 perusahaan	49	
2.01.01.15.02	Pembinaan Pengembangan Hubungan Industrial dan Pengembangan (Dewen Pengupahan, Tripartit, LKS Bipartit, Mayday)	Meningkatnya kondusifitas hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh	350 perusahaan	130 perusahaan	- perusahaan	- perusahaan	-	130 perusahaan	37	
2.01.01.15.03	Pembinaan dan Evaluasi Serikat Kerja	Meningkatnya peran kerja yang lebih baik di perusahaan	350 perusahaan	103 perusahaan	- perusahaan	- perusahaan	-	103 perusahaan	29	
2.01.01.15	Pembinaan dan Evaluasi Syarikat-eksternal kerja	Meningkatnya administrasi ketenagakerjaan	1.200 dokumen	- dokumen	200 dokumen	200 dokumen	100	200 dokumen	17	



Kode	Uraian/Bidang Uraian Peminoritan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Reje SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.01.01.15	Dewan Pengupahan	Meningkatnya kondusifitas hubungan industrial di kab. Subabumi	5.064 orang	- orang	994 orang	994 orang	100	41 orang	1.035 orang	11*(10/4*100)
2.01.01.15	May Day (Hari buruh nasional)	Terselenggaranya hari buruh nasional	2.520 orang	- orang	420 orang	420 orang	100	528 orang	948 orang	38
2.01.01.15	Pembinaan dan Pemeliharaan Pekerja Teladan	Peserta pemilihan pekerja teladan	300 orang	- orang	50 orang	50 orang	100	- orang	50 orang	17
2.01.01.15.05	Rapat Koordinasi Hubungan Industrial dan Syarat kerja	Peserta Rakor (OPD, kecamatan, dan instansi terkait)	300 orang	150 orang	- orang	- orang	-	- orang	150 orang	50
2.01.01.81	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan dan jumlah KK transmigran yang dibina								
2.01.01.81	Fasilitasi dan Klarifikasi Penanganan Konflik di lokasi transmigrasi baru pulau jawa	Jumlah konflik yang diselesaikan	2 lokasi	- lokasi	- lokasi	- lokasi	-	- lokasi	- lokasi	-
2.01.01.81.02	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dimonitoring dan evaluasi	4 lokasi	2 lokasi	- lokasi	- lokasi	-	1 lokasi	3 lokasi	75
2.01.01.81.03	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Lokal	Jumlah transmigrasi yang dibina	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100	2 lokasi	12 lokasi	240
2.01.01.81.04	Penggerakan dan Pemoptimalan Transmigrasi	Jumlah kk transmigran	20 kk	7 kk	5 kk	5 kk	100	- kk	12 kk	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Revisi SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan Revisi SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Revisi SKPD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2019	Realisasi Kinerja SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Revisi SKPD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2101 01 81 05	Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dokumen MoU	2 moU	1 moU	1 moU	1 moU	8=7/8*100	1 moU	3 moU	11=10/4*100
2101 01 81 05	Sosialisasi Transmigrasi	Jumlah Peserta Sosialisasi	218 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100	- orang	300 orang	138



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

### a. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian ditetapkan 2 (dua), yaitu :

#### Urusan Ketenagakerjaan

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja, capaian kinerja 80,95% dengan rumusan perbandingan Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dengan Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten dikali 100%.
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, capaian kinerja 64,73% dengan rumusan perbandingan Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan Jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100%.
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, capaian kinerja 45,26 Rupiah dengan rumusan perbandingan PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) dengan Jumlah tenaga kerja dikali 100%.
4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala



Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), capaian kinerja 100% dengan rumusan perbandingan Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan Jumlah Perusahaan dikali 100%.

5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten, capaian kinerja 52,22% dengan rumusan perbandingan Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan dengan Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%.
6. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial, capaian kinerja 100% dengan rumusan perbandingan Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial dengan Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dikali 100%.
7. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi, capaian kinerja 68,18% dengan rumusan perbandingan Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi dengan Jumlah Instruktur dikali 100%.
8. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan, capaian kinerja 93,85% dengan rumusan perbandingan Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan dengan Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dikali 100%.





### **Urusan Ketransmigrasian**

1. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya, capaian kinerja 7 Lokasi Pemukiman dengan rumusan Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya.

### **2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

#### **a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain :

1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
2. Tingginya jumlah pengangguran;
3. Rendahnya tingkat pendidikan;
4. Minimnya perlindungan hukum;
5. Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kab/Kota;
6. Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh pada kondusifitas daerah;
7. Penganggur atau Pencari Kerja kurang memiliki kreativitas dan inovasi- inovasi.



Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diantaranya adalah : terbatasnya tenaga fungsional pengantar kerja dan mediator, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, masih terdapat anak dibawah umur yang bekerja, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja. Rendahnya motivasi tenaga kerja Kabupaten Sukabumi untuk bekerja di luar Kabupaten Sukabumi.

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah: kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil. Permasalahan ketransmigrasian diantaranya adalah terkait tidak seimbangannya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Sukabumi, dan adanya ketidaksesuaian tata naskah dan prosedural penyusunan perjanjian kerjasama (MoU) antara pemerintah daerah lokasi transmigrasi, pemerintah provinsi, dan



pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi.

#### **b. Isu Strategis**

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, hasil analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan para pakar ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut :

1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
4. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;
5. Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

Cakupan masalah yang luas :

1. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif;
2. Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal Kabupaten Sukabumi;
3. Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan;





4. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu.

Permasalahan menurut *stakeholders* :

- 1) Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi relatif belum didayagunakan secara maksimal;
- 2) Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal;
- 3) Tingginya tingkat migrasi dan jumlah pendatang yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Sukabumi lulus sekolah tidak kembali ke daerahnya;
- 4) Kurang link and match-nya antara lulusan pendidikan formal dengan dunia kerja;
- 5) Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/outsourching, berpotensi pada terjadinya pekerja kembali menjadi penganggur;
- 6) Tingginya pelanggaran norma kerja;
- 7) Kasus perselisihan hubungan industrial yang berlarut-larut.

Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, didukung dengan upaya pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi yang dianggap belum maksimal,





juga berdasarkan isu-isu strategis, maka perlu ditindaklanjuti dengan suatu rencana tindak berupa program dan kegiatan yang nyata, didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan, disusunlah program-program sebagai berikut:

- 1) Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
- 2) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3) Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- 4) Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021 disusun telah berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Namun dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 untuk mengganti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka dibuatkan Pemetaan terhadap Program dan Kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD sehingga terjadi sinkronisasi antara Program dan Kegiatan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja terdiri dari 3 Program dan 21 Kegiatan, Urusan Pilihan Ketransmigrasian terdiri dari 1 Program dan 5 Kegiatan. Serta 5 program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.



---

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di kabupaten sukabumi, disnakertrans telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui system aplikasi RKPD Online 2021. Usulan tersebut ditelaah oleh bidang yang ada di disnakertrans dan kemudian diteruskan ke Bappeda terkait untuk diusulkan melalui forum PD dan Musrenbang Kabupaten. Hasil dari telaahan usulan masyarakat oleh bagian perencanaan disnakertrans tersebut dialokasikan pada Tahun Anggaran 2021, namun sebagian tidak terdapat substansi yang terkait dengan tema tahun 2021, yaitu pemeliharaan infrastruktur wilayah.



### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (*a-spatial*). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukabumi.



Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut :





Urusan Tenaga Kerja

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Pelaksanaan Pelatihan Vokasi Berdasarkan Klaster Kompetensi dan Kerjasama dengan Industri	Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan dalam negeri	425.000 tenaga kerja (225.000 tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan 200.000 tenaga kerja yang mengikuti pemagangan dalam negeri)	1. Pelaksanaan pelatihan dan pemagangan di daerah 2. Perizinan dan akreditasi Lembaga Pendidikan Keterampilan di daerah 3. Sertifikasi kompetensi 4. Penyediaan instruktur Aparatur Sipil Negara di Daerah 5. Penguatan fungsi konsultansi dan pengukuran produktivitas
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan	Penguatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Daerah	Data Pencari Kerja dan Lowongan Pekerjaan pada	800.000 pencari kerja dan lowongan pekerjaan (terintegrasi dengan SISNAKER)	1. Penyediaan pengantar kerja dan petugas antar kerja di daerah. 2. Penguatan fungsi



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2) Berkualitas	(3) yang Terintegrasi	(4) Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	(5) (6)	(6) pengantar kerja dan petugas antar kerja di daerah. 3. Penguatan fungsi pemanfaatan SISNAKER
		Pemberdayaan tenaga kerja disabilitas	Pelaksanaan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan	1 layanan	Penyediaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Fungsi Layanan Disabilitas dimaksud dapat dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
		Perusahaan yang Menerapkan	Perusahaan yang Tersertifikasi pada Bidang	5.000 perusahaan	Audit SMK3 pada perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Keamanan kerja (SMK3)	Kelembagaan, Keahlian dan SMK3		lebih atau perusahaan yang memiliki resiko bahaya tinggi
		Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos TK)	Perusahaan di Kawasan Industri yang Menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK	8.400 perusahaan	Pemeriksaan objek pengawasan (perusahaan) sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya
		Perusahaan yang Mendapatkan	Perusahaan yang belum memiliki struktur dan	1.250 perusahaan	Pelatihan penyusunan struktur skala upah untuk mendorong pengupahan di



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	skala upah		atas upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja diatas 1 tahun meningkatkan hubungan industrial yang harmonis
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih dan belum memiliki peraturan perusahaan	1.000 perusahaan	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan melalui Peraturan Perusahaan elektronik (e-PP) yang terintegrasi dg SISNAKER
		Penyelenggaraan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	Pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta Jamsos TK	34 provinsi dan 514 kabupaten/kota	Pengelolaan data hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja antara lain melalui pemanfaatan Wajib Laporan





NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jamsos TK			Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dalam jaringan/online melalui SISNAKER dan penyebar luasan informasi sarana hubungan industrial dan Jamsos TK
		Peningkatan peran lembaga hubungan industrial provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga Kerja Sama Tripartit atau Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	34 provinsi dan 514 kabupaten/kota	Menyusun alokasi kegiatan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (memfasilitasi kegiatan peningkatan fungsi kesekretariat penyediaan sarana prasarana dan lain- lain melalui alokasi APBD)
		Pembentukan	Perusahaan yang	1.000 perusahaan	Kegiatan yang dilaksanakan



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Lembaga Hubungan Industrial di Perusahaan	mempekerjakan 50 orang atau lebih dan belum membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit		tidak hanya melalui sosialisasi tetapi juga dilakukan dalam bentuk pendampingan sampai terbentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha	Serikat pekerja/serikat buruh (SP perusahaan, Federasi, Konfederasi) dan organisasi pengusaha	16 Konfederasi dan 147 federasi	Optimalisasi penerapan dan kualitas dialog sosial dalam pengelolaan hubungan industrial melalui peningkatan keterwakilan organisasi pekerja dan perusahaan dalam lembaga hubungan industrial di tingkat perusahaan, provinsi dan kabupaten/kota



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial	Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial melalui mediasi atau konsiliasi	80% (delapan puluh perse)	Peningkatan kuantitas dan kapasitas mediator hubungan industrial dan konsiliator hubungan industrial dalam penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna) di Daerah	Calon PMI dan PMI Purna serta keluarganya di Daerah asal	250.000 orang	Penyediaan dan/atau penguatan Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah Pelaksanaan pemberdayaan Petugas Komunitas Migran



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Produktif di desa dalam memberikan Pelindungan pada Calon PMI dan pemberdayaan PMI Purna





Urusan Transmigrasi

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKP 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi				<ul style="list-style-type: none"><li>• Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang diharapkan adalah:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Menyediakan dokumen perencanaan teknis yang mencakup: Perencanaan SKP dan KPB, Penyediaan Tanah, Perencanaan Teknis SP dan Pusat SKP, Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi;</li><li>2) Melakukan pembangunan kawasan transmigrasi yang sesuai dengan NSPK yang ditetapkan, yang meliputi:</li></ol></li></ul>



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3)			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
					Pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, dan evaluasi perwujudan ruang; 3) Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, yang meliputi: menyiapkan calon transmigrasi, mediasi dan persiapan perpindahan penduduk, fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi, penataan penduduk setempat dan adaptasi lingkungan.



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Menyediakan dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program bagi pembangunan kawasan transmigrasi untuk mengoptimalkan fungsi satuan permukiman di kawasan transmigrasi melalui: penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan; penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan,</li></ul>



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; pelayanan dasar administrasi masyarakat; penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-kota kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan bahan baku dan pendukung.





NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan Tanah Transmigrasi melalui fasilitasi penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	Memfasilitasi penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daerah meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui: sertifikasi hak atas tanah di kawasan transmigrasi;</li><li>• Daerah melaksanakan redistribusi tanah, untuk pengembangan kawasan transmigrasi; pemberian sertipikat tanah (legalisasi) untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998;</li><li>• Untuk mendukung pembangunan IKN, Daerah menetapkan prioritas kebijakan fasilitasi sertifikasi</li></ul>



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				tanah Transmigrasi. Arah kebijakan, tujuan, strategi, dan program Daerah yang diharapkan adalah: 1) Melakukan pengembangan pengembangan SP dan Pusat SKP sesuai, yang mencakup: pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha, prasarana dan sarana, pengembangan kelembagaan dan pengelolaan lingkungan,



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pengurusan hak atas tanah dan pengelolaan aset, serta advokasi pertanian; 2) Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang meliputi: Fasilitas Transmigran Swakarsa Mandiri, Pengembangan Konektivitas Intra dan Antar SKP, dan antar kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan, evaluasi perkembangan SP dan SKP, serta evaluasi perkembangan KPB dan



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					kawasan transmigrasi; 3) Menyediakan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan, yang meliputi: perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, dan perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan;





NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3)			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
					4) Menyediakan Kebijakan dan regulasi kelembagaan dan pengembangan ekonomi dan investasi kawasan transmigrasi, yang mencakup: Pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama, pengembangan badan pengelola perdesaan, pengembangan kelembagaan ekonomi, dan pengembangan kelembagaan investasi di kawasan transmigrasi;



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					5) Melakukan pelayanan investasi perdesaan, yang meliputi: pelayanan informasi potensi investasi, fasilitasi pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, dan pengembangan kewirausahaan; 6) Melakukan pengembangan produk unggulan di kawasan transmigrasi yang memiliki keunggulan berdaya saing, yang mencakup:



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan;</p> <p>7) Melakukan promosi dan pemasaran produk unggulan, yang mencakup: pengembangan strategi</p>



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pemasaran, pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran (convensional, infrastruktur e- commerce platform dan marketplace) 8) Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui: rencana dan program





NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					aksi pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan diseminasi, pelayanan pendampingan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat; 9) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat di di kawasan transmigrasi, yang mencakup: penyediaan rencana dan program pelatihan, penyediaan kelembagaan dan tenaga pelatihan,



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RPKD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					melakukan standarisasi dan sertifikasi profesi, serta pengembangan kerjasama pelatihan; 10) Melakukan pembinaan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), yang mencakup: Rencana dan Program Pengembangan PSM, pemenuhan Standarisasi dan Sertifikasi PSM, Pengembangan Profesi PSM, dan fasilitasi Evaluasi dan Penilaian



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					PSM; 11) Melakukan pengkajian pembangunan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan investasi di kawasan transmigrasi.
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	12) Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program untuk pengembangan kawasan transmigrasi melalui: penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan,



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL (2)	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH (3)			
(1)			(4)	(5)	(6)  pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; pelayanan dasar administrasi masyarakat; penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-kota kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan bahan baku dan pendukung.





NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan Usaha Transmigrasi	Mengembangkan ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	13) Daerah menetapkan arah kebijakan, strategi, dan program untuk mengembangkan pembangunan kawasan transmigrasi untuk mengoptimalkan fungsi satuan permukiman di kawasan transmigrasi melalui: penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan; penguatan konektivitas dengan pusat-



NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2021
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pusat produksi bahan baku di kawasan transmigrasi, dengan pusat pertumbuhan (kota-kota kecil, dan kota-kota menengah) dalam pengadaan bahan baku dan pendukung; peningkatan/penguatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan sosial-budaya ketransmigrasian.
	Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Memfasilitasi penerbitan Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Terfasilitasinya penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	14) Daerah meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui: sertifikasi hak atas tanah di kawasan transmigrasi;	



### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Mengacu pada visi dan misi RPJMD 2016-2021,

#### **Visi**

*“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”*

#### **Misi**

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Dan selanjutnya dituangkan dalam Program-program pembangunan yaitu : misi 2 ; Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius.

Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah : 1; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, 2; Tingkat Pengangguran Terbuka.

Oleh karena itu dalam upaya pencapaian target kinerja Kabupaten Sukabumi, ditetapkan Tujuan dan Sasaran bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :



#### Tujuan

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha.

#### Sasaran

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Pekerja Serta Melindungi Hak-hak Pekerja.
2. Meningkatnya Jumlah Transmigran yang diberangkatkan dan Terbinanya Transmigran dan Translok;

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, yang diimplementasikan dalam sasaran program, yaitu : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja dengan target kinerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Pencari Kerja dan Memiliki Kompetensi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial; serta Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok dengan target kinerja adalah Jumlah KK Transmigran yang diberangkatkan dan Jumlah KK Transmigran yang dibina. Target kinerja ini merupakan dasar pertimbangan disusunnya Rencana Program dan Kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Urusan Ketenagakerjaan acuan kinerjanya tercantum dalam Misi 1 Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.





Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi menetapkan program-program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Penetapan program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di bawah ini :

1. Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja; Program yang mendukung adalah :
  - Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; Dengan Kegiatan sebagai berikut :
    - ✓ Perluasan Kesempatan Kerja
    - ✓ Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
    - ✓ Pengembangan Teknologi Tepat Guna
    - ✓ Jobfair
    - ✓ Pembinaan Bursa Kerja Khusus
    - ✓ Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing
    - ✓ Diseminasi Peraturan Ketenagakerjaan
    - ✓ Pelayanan Pemulangan TKI
    - ✓ Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
  - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Dengan Kegiatan sebagai berikut :
    - ✓ Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Institusional (UPT BLK)
    - ✓ Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional (UPT BLK)



- ✓ Pembinaan Pelatihan dan Pemagangan
- ✓ Pembinaan dan Fasilitasi Penerbitan Perizinan dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; Dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - ✓ Pembinaan Kelembagaan dan Syarat Kerja
  - ✓ Pembinaan Pengembangan dan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial
  - ✓ Dewan Pengupahan
  - ✓ Pembinaan dan Evaluasi Serikat Pekerja
  - ✓ Mayday (Hari Buruh Nasional)
  - ✓ Pembinaan dan Pemilihan Pekerja Teladan
  - ✓ Perusahaan Terbaik Pembina Pekerja Perempuan
  - ✓ LKS Tripartit
- 2. Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok; Program yang mendukung adalah :
  - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; Dengan Kegiatan sebagai berikut :
    - ✓ Pembinaan dan Peninjauan Lokasi Transmigrasi di Luar Pulau Jawa
    - ✓ Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Lokal
    - ✓ Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi
    - ✓ Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
    - ✓ Sosialisasi Transmigrasi
- 3. Mewujudkan kualitas kerja yang efisien dan efektif dengan prinsip penyelenggaraan



pemerintahan yang bersih; Program yang mendukung adalah :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - ✓ Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - ✓ Pelayanan Administrasi Aset
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - ✓ Team Building/Outbond dan Olahraga Rutin Mingguan
  - ✓ Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - ✓ Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
  - ✓ Forum Perangkat Daerah
  - ✓ Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan
  - ✓ Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan Dan Ketrasmigrasian
  - ✓ Penyusunan Laporan Keuangan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - ✓ Pengadaan Mebeulair
  - ✓ Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
  - ✓ Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional



- ✓ Rehabilitasi Gedung Kantor
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- ✓ Penataan Halaman dan Taman Kantor
- ✓ Penataan dan Pengamanan Arsip





**Tabel 3.3.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2022**

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 01	Uraian Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja									
2 01 01	Bidang Uraian Ketenagakerjaan									
2 01 01 13	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Kerja</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>								
2 01 01 13 14	Pertuisan Kemampuan Kerja	Mengurangi penganggur sementara	Kecamatan dikabupaten sukabumi	70-4 Orang	1.576.000.000	APBD		70-4 Orang	1.576.000.000	
2 01 01 13 13	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah peserta pembekalan wirausaha	Kecamatan dikabupaten sukabumi	200 Orang	980.000.000	APBD		200 Orang	980.000.000	
2 01 01 13 07	Peningkatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah masyarakat yang mengikuti pengembangan teknologi tepat guna	Kecamatan dikabupaten sukabumi	60 Orang	300.000.000	APBD		60 Orang	300.000.000	
2 01 01 13 02	Jabifar	Pencari Kerja yang terampil	Kec. Cibadak	40 Perusahaan	230.000.000	APBD		40 Perusahaan	230.000.000	
2 01 01 13 15	Pembinaan Bursa Kerja Khusus	Jumlah BKK yang terbina	Kec. Ciantayan	60 Orang	25.000.000	APBD		60 Orang	25.000.000	
2 01 01 13 16	Pembinaan Perusahaan Pengusaha Tenaga Kerja Asing	Tenaga kerja asing di sukabumi yang dibina	Kecamatan dikabupaten sukabumi	40 Orang	15.000.000	APBD		40 Orang	15.000.000	
2 01 01 13 3	Diseminasi Peraturan Ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman peserta tentang prosedur peraturan ketenagakerjaan	Kecamatan dikabupaten sukabumi	240 Orang	100.000.000	APBD		240 Orang	100.000.000	
2 01 01 13	Pelayanan Pemulangan TKI	Jumlah TKI yang bermasalah yang pulang ke wilayah kab. Sukabumi	Kecamatan dikabupaten sukabumi	8 Orang	25.000.000	APBD		8 Orang	25.000.000	
2 01 01 13	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga kerja asing di sukabumi yang dibina	Kecamatan dikabupaten sukabumi	20 Perusahaan	25.000.000	APBD		20 Perusahaan	25.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021					Praktisn Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 01 01 14	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja di wilayah kab. Sukabumi</b>							
2 01 01 14	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Institusional	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	BLK Diemakertans	340 Orang	1.700.000.000	APBD		340 Orang	1.700.000.000
2 01 01 14	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	Kecamatan dibabupaten sukabumi	220 Orang	1.000.000.000	APBD		220 Orang	1.000.000.000
2 01 01 14 03	Pembinaan Pelatihan dan Pemagangan	Jumlah peserta pelatihan yang magang diperusahaan	Kecamatan dibabupaten sukabumi	332 Orang	614.000.000	APBD		332 Orang	614.000.000
2 01 01 14 04	Pembinaan dan Fasilitasi Pemberitaan Perizinan dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang dibina	Kecamatan dibabupaten sukabumi	73 LPK/BLK	572.500.400	APBD		73 LPK/BLK	572.500.400
2 01 01 15	<b>Program Perfindungan Pengembangan Lembaga</b>	Pemertase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial							
2 01 01 15 01	<b>Ketasmakeraan</b> Sembinaan dan Syarat Kerja	Jumlah Perusahaan yang dibina	Kecamatan dibabupaten sukabumi	10 Lembaga	100.000.000	APBD		10 Lembaga	100.000.000
2 01 01 15 02	Pembinaan dan Pengembangan dan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Jumlah Kasus Hubungan Industrial	Kecamatan dibabupaten sukabumi	65 Kasus	260.000.000	APBD		65 Kasus	260.000.000
2 01 01 15 03	Dewan Pengupahan	Peserta Rapat Dewan Pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak dan Pengujian Kemampuan Perusahaan	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	41 Orang	300.000.000	APBD		41 Orang	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Praktoran Misi Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	9		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 01 01 15 04	Pembinaan dan Evaluasi Serikat Pekerja	Jumlah SP/SB yang terbina	Kecamatan dikabupaten sulawesi	300 Orang	150.000.000	APBD		300 Orang	150.000.000	
2 01 01 15 05	Mayday (Hari Buruh Nasional)	Peserta rapat persiapan hari buruh nasional, Peserta rapat evaluasi hari buruh nasional, Peserta Forum Grup Discussion (FGD)	Kecamatan dikabupaten sulawesi	500 Orang	150.000.000	APBD		500 Orang	150.000.000	
2 01 01 15 06	Pembinaan dan Pemilihan Pekerja Teladan	Peserta Pemilihan Pekerja Teladan	Kecamatan dikabupaten sulawesi	50 Orang	100.000.000	APBD		50 Orang	100.000.000	
2 01 01 15 07	Perusahaan Terbaik Pembina Pekerja Perampuan	Peserta Pemilihan Perusahaan Terbaik Pembina Pekerja Perampuan	Kecamatan dikabupaten sulawesi	50 Perusahaan	150.000.000	APBD		50 Perusahaan	150.000.000	
2 01 01 15 08	LKS Tripartit	Pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	28 Orang	150.000.000	APBD		28 Orang	150.000.000	
2 01 01 81	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	Jumlah KK transmigrasi yang diberangkatkan dan jumlah KK transmigrasi yang dibina								
2 01 01 81	Pembinaan dan Peningkatan Lokasi Transmigrasi di Luar Pulau Jawa	Jumlah lokasi transmigrasi yang di maney	Provinsi Gorontalo	2 Lokasi	94.750.000	APBD		2 Lokasi	94.750.000	
2 01 01 81 03	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Lokal	Jumlah transmigrasi yang dibina	Kec. SAGARANTEN, CIDOLOG, LENGKONG, CIEMAS	5 Lokasi	194.760.000			5 Lokasi	194.760.000	
2 01 01 81 04	Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah transmigrasi yang akan dikirim ke luar pulau jawa	Provinsi Sulawesi Tenagah	5 KK	89.823.000			5 KK	89.823.000	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201 01 81 05	Peningkatan Kerjasama antar wilayah dalam rangka Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dokumen MoU	Provinsi Sulawesi Tengah	1 MoU	66.090.000	APBD		1 MoU	66.090.000
201 01 81 06	Sosialisasi Transmigrasi	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kecamatan Ciantuyan	200 Orang	69.370.000	APBD		200 Orang	69.370.000



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021**

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2021										Usulan Pagu 2021
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>															
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>															
1	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Insitusional (UPT BLK)	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	UPTD DISNAKERTRANS KABUPATEN SUKABUMI	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi 100%			Jumlah peserta yang dilatih 340 Orang			dukungan 43,7 terhadap Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi sebesar 100%			1.700.000.000	
2	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Non Insitusional (UPT BLK)	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Kecamatan Bantargadung, BojongGenteng, Caringin, Ciambar, Cibadak, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadak, Cidahu, Cidolog, Cemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cimanggu, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, Cisolak, Curugkembang, GegerBitung, GunungGuruh, JampangKulon, JampangTengah, Kabandungan, Kadudampit, KalapaNunggal, KaliBunder, Kebonpedes, Lengkong, Nagrak, Nyalindung, Pabuaran, ParakanSalak, ParungKuda, PalabuhanRatu, Purabaya, Sagaranan, Simpenan, Sukabumi, Sukalarang, Sukaraja, Surade, TegalBuleud, Waluran, WarungKiara;	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi 100%			Jumlah masyarakat yang dilatih 220 orang			dukungan 25,7% terhadap Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi sebesar 100%			1.000.000.000	
3	Pembinaan Pelatihan dan Pemagangan	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI; Kecamatan Bantargadung, BojongGenteng, Caringin, Ciambar, Cibadak, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadak, Cidahu, Cidolog, Cemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cimanggu, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, Cisolak, Curugkembang, GegerBitung, GunungGuruh, JampangKulon, JampangTengah, Kabandungan, Kadudampit, KalapaNunggal, KaliBunder, Kebonpedes, Lengkong, Nagrak, Nyalindung, Pabuaran, ParakanSalak, ParungKuda, PalabuhanRatu, Purabaya, Sagaranan, Simpenan, Sukabumi, Sukalarang, Sukaraja, Surade, TegalBuleud, Waluran, WarungKiara;	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi 100%			Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri menjadi Wirausaha Baru 141 orang; Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Alumni Pelatihan 50 orang; Rakor dengan Kepala Desa mengenai Pelatihan Pemagangan 141 orang;			dukungan 15,8% terhadap Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi sebesar 100%			614.000.000	

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2021										Usulan Pagu 2021
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan		
1	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Pembinaan dan Fasilitas Penerimaan dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI; Kecamatan Bantargadung, BojongGenteng, Caringin, Ciambar, Cibadak, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadap, Cidahu, Cidolog, Ciemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cimanggu, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, Cisolok, Curugkembang, GegerBitung, GunungGuruh, JampangKulon, JampangTengah, Kabandungan, Kadudampit, KalapaNunggal, KaliBunder, Kebonpedes, Lengkokong, Nagrak, Nyalindung, Pabuaran, ParakanSalak, ParungKuda, PalabuhanRatu, Purabaya, Sagaranten, Simpenan, Sukabumi, Subalarang, Sukaraja, Surade, TegalBuleud, Waluran, WarungKiara;	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi 100%;									dukungan 14,7% terhadap Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi sebesar 100%	572.500.400
5	Program Perindungan Pengembangan Lembaga Krtanagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI; Kecamatan Bantargadung, BojongGenteng, Caringin, Ciambar, Cibadak, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadap, Cidahu, Cidolog, Ciemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cimanggu, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, Cisolok, Curugkembang, GegerBitung, GunungGuruh, JampangKulon, JampangTengah, Kabandungan, Kadudampit, KalapaNunggal, KaliBunder, Kebonpedes, Lengkokong, Nagrak, Nyalindung, Pabuaran, ParakanSalak, ParungKuda, PalabuhanRatu, Purabaya, Sagaranten, Simpenan, Sukabumi, Subalarang, Sukaraja, Surade, TegalBuleud, Waluran, WarungKiara;	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial 100%									dukungan 7,4% terhadap Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial sebesar 100%	100.000.000



No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2021											
					Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Uraian Pagu 2021		
1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pembinaan Pengembangan dan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI; Kecamatan Bantargadung, BojongGenteng, Caringin, Ciambar, Cibadak, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadak, Cidahu, Cidolog, Ciemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cimanggung, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, Cisolak, Curugkembar, GegerBitung, GunungGuruh, JampangKulon, JampangTengah, Kabandungan, Kadudampit, KalapaNunggal, KaliBunder, Kebonpedes, Lengkong, Nagrak, Nyalindung, Pabuaran, ParakanSalak, ParungKuda, PalabuhanRatu, Purabaya, Segaranten, Simpenan, Sukabumi, Sukalarang, Sukaraja, Surade, TegalBuleud, Waluran, WarungKiara;	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial 100%			Jumlah Kasus Hubungan Industrial 65 kasus;			Jumlah Kasus Hubungan Industrial 11				dukungan 19,1% terhadap Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial sebesar 100%	260.000.000
	Dewan Pengusahaan	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial 100%			Peserta Rapat Dewan Pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak dan Pengkajian Kemampuan Perusahaan 41 orang;							dukungan 22,1% terhadap Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial sebesar 100%	300.000.000
	Pembinaan dan Evaluasi Serikat Pekerja	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI; Kecamatan Bantargadung, BojongGenteng, Caringin, Ciambar, Cibadak, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadak, Cidahu, Cidolog, Ciemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cimanggung, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, Cisolak, Curugkembar, GegerBitung, GunungGuruh, JampangKulon, JampangTengah, Kabandungan, Kadudampit, KalapaNunggal, KaliBunder, Kebonpedes, Lengkong, Nagrak, Nyalindung, Pabuaran, ParakanSalak, ParungKuda, PalabuhanRatu, Purabaya, Segaranten, Simpenan, Sukabumi, Sukalarang, Sukaraja, Surade, TegalBuleud, Waluran, WarungKiara;	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial 100%			Jumlah SP/SB yang terbina 300 Orang;							dukungan 11% terhadap Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial sebesar 100%	150.000.000











No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2021										Usulan Pagu 2021
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan		
18	Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	3 Tingkat pengangguran terbuka	4 Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	5 Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI; Kecamatan Bantargadung, BojongGenteng, Caringin, Ciambar, Cibadaa, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadak, Oldahu, Cidolog, Cemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cimanggu, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, Cisolak, Curugkembang, GegerBitung, GunungGuruh, JampangKulon, JampangTengah, Kabandungan, Kadudampit, KalapaNunggal, Kaibunder, Kebonpedes, Lengkung, Nagrak, Nyalindung, Pabuaran, ParakanSalak, ParungKuda, PalabuhanRatu, Purabaya, Sagaranten, Simpenan, Sukabumi, Sukalarang, Sukaraja, Surade, TegalBuleud, Waluran, WarungKiara.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Diseminasi Peraturan Ketenagakerjaan	3 Tingkat pengangguran terbuka	4 Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	5 Kecamatan Bantargadung, BojongGenteng, Caringin, Ciambar, Cibadaa, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadak, Oldahu, Cidolog, Cemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cimanggu, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, Cisolak, Curugkembang, GegerBitung, GunungGuruh, JampangKulon, JampangTengah, Kabandungan, Kadudampit, KalapaNunggal, Kaibunder, Kebonpedes, Lengkung, Nagrak, Nyalindung, Pabuaran, ParakanSalak, ParungKuda, PalabuhanRatu, Purabaya, Sagaranten, Simpenan, Sukabumi, Sukalarang, Sukaraja, Surade, TegalBuleud, Waluran, WarungKiara.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

dukungan 0,5% terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7-12%;

Perusahaan yang dibina mempekerjakan tenaga kerja asing 40 orang;

dukungan 3% terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7-12%

Peserta Diseminasi 240 Orang;

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2021								Usulan Pagu 2021		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Tolak Ukur	Target		Satuan	
					Tolak Ukur	Target	Satuan	Target	Satuan	Tolak Ukur					Target
1	20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelayanan Pemulangan TKI	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kecamatan Bantargadung, BojongGenteng, Caringin, Ciambar, Cibadak, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadap, Cidahu, Cidolog, Ciemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cimanggu, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, Cisolok, Curugkembar, GejerBitung, GunungGuruh, JampangKulon, JampangTengah, Kabandungan, Kadudampit, KalapaNunggal, KaliBunder, Kebonpedes, Lengkung, Nagrak, Nyalindung, Pabuaran, ParakanSalak, ParungKuda, PelabuhanRatu, Purabaya, Sagarannten, Simpenan, Sukabumi, Sukalarang, Sukaraja, Surade, TegalBuleud, Waluran, WarungKiara;	Tingkat pengangguran terbuka 7-12%;	Jumlah TKI yang bermasalah pulang ke wilayah kab. sukabumi 8 Orang;	Jumlah TKI yang bermasalah pulang ke wilayah kab. sukabumi 8 Orang;	Jumlah TKI yang bermasalah pulang ke wilayah kab. sukabumi 8 Orang;	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan di perusahaan 20 Perusahaan;	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan di perusahaan 20 Perusahaan;	Jumlah TKI yang bermasalah pulang ke wilayah kab. sukabumi 8 Orang;	dukungan 1% terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7-12%	dukungan 1% terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7-12%	25.000.000	
21	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi hak-hak pekerja	Kecamatan Bantargadung, BojongGenteng, Caringin, Ciambar, Cibadak, Cibitung, Cicantayan, Cicurug, Cidadap, Cidahu, Cidolog, Ciemas, Cikakak, Cikembar, Cikidang, Cimanggu, Ciracap, Cireunghas, Cisaat, Cisolok, Curugkembar, GejerBitung, GunungGuruh, JampangKulon, JampangTengah, Kabandungan, Kadudampit, KalapaNunggal, KaliBunder, Kebonpedes, Lengkung, Nagrak, Nyalindung, Pabuaran, ParakanSalak, ParungKuda, PelabuhanRatu, Purabaya, Sagarannten, Simpenan, Sukabumi, Sukalarang, Sukaraja, Surade, TegalBuleud, Waluran, WarungKiara; Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi, Cikarang, Karawang, Depok;	Tingkat pengangguran terbuka 7-12%;	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan di perusahaan 20 Perusahaan;	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan di perusahaan 20 Perusahaan;	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan di perusahaan 20 Perusahaan;	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan di perusahaan 20 Perusahaan;	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan di perusahaan 20 Perusahaan;	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan di perusahaan 20 Perusahaan;	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan di perusahaan 20 Perusahaan;	dukungan 1% terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7-12%	dukungan 1% terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7-12%	25.000.000
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>															
22	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Pegawai yang dilayani 96 Orang;	Jumlah Pegawai yang dilayani 96 Orang;	Jumlah Pegawai yang dilayani 96 Orang;	Jumlah Pegawai yang dilayani 96 Orang;	Jumlah Pegawai yang dilayani 96 Orang;	Jumlah Pegawai yang dilayani 96 Orang;	dukungan 98,85% terhadap Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar	dukungan 98,85% terhadap Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar	4.723.343.200	
23	Pelayanan Administrasi Aset	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Aset yang dilayani 100 Unit;	Jumlah Aset yang dilayani 100 Unit;	Jumlah Aset yang dilayani 100 Unit;	Jumlah Aset yang dilayani 100 Unit;	Jumlah Aset yang dilayani 100 Unit;	Jumlah Aset yang dilayani 100 Unit;	dukungan 1,15% terhadap Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar	dukungan 1,15% terhadap Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar	20.000.000	

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2021							Ukulan Pagu 2021		
					Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			
					Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur		Target	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program: peningkatan Disiplin Aparatur</b>														
24	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tingkat disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Tingkat disiplin aparatur		Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli 96 Stel;		33,33%					48.000.000
25	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tingkat disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Tingkat disiplin aparatur		Jumlah Pakaian Khusus yang dibeli 96 Stel;		66,67					96.000.000
<b>Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>														
26	Team Building/Outbond dan Olahraga Rutin Mingguan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Jumlah Peserta Team Building Outbond 96 Orang;		60%					90.960.000
27	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi 75 Orang;		40%					100.000.000
<b>Program: Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>														
28	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja 9 Dokumen;		18,18%					100.000.000
29	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja 1 Dokumen;		9,09%					50.000.000
30	Forum Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Kecamatan: CICANTAYAN, Desa/Kelurahan: CISANDE ; Kecamatan: SUKABUMI, Desa/Kelurahan: SUDAUJAYA GIRANG. ;	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Jumlah Peserta 75 Orang;		9,09%					40.000.000
31	Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah		Pengembangan Sistem Manajemen Ketenagakerjaan (SIMTEK) 1 Website;		27,27%					150.000.000







No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2021										Usulan Pagu 2021
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
38	Pembangunan Gedung Kantor.	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan: CICANTAYAN, Desa/Kelurahan: LEMBURSAWAH ;	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur			Luas Gedung yang di bangun 1773858 m2;			Dukungan 49,11% terhadap Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur sebesar 1000%			15.000.000.000	
39	Rehabilitasi Gedung Kantor	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur			Luas Gedung yang direhab 1000 m2;			Dukungan 0,61% terhadap Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur sebesar 100%			185.000.000	
40	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur			Jumlah Kendaraan roda dua yang dipelihara 27 Unit; Jumlah Kendaraan roda empat yang dipelihara 9 Unit;			Dukungan 1,64% terhadap Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur sebesar 100%			500.000.000	
41	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur			Pemeliharaan pengisian alat kebakaran (apar) 9 unit; pemeliharaan perlengkapan kantor 79 unit gedung kantor 5 gedung 2500 m2;			Dukungan 0,59% terhadap Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur sebesar 100 %			181.320.000	
42	Penataan Halaman dan Taman Kantor	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur			Luas Halaman dan Taman yang ditata 900 m2 2 lokasi;			Dukungan 0,51% terhadap Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur sebesar 100%			150.000.000	
43	Penataan dan Pengamanan Arsip	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kantor DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur			Jumlah Arsip yang ditata dan diamankan 200 dokumen;			Dukungan 0,33% terhadap Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur sebesar 100 %			100.000.000	

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja tahun 2021										Usulan Pagu 2021
					Hasil Program		Keleuaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan	Tolak Ukur	Target	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Program pengembangan wilayah Transmigrasi</b>															
44	Pembinaan dan Peninjauan Lokasi Transmigrasi di Luar Pulau Jawa	Jumlah KK transmigran yg dibina	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Provinsi Gorontalo	Jumlah KK transmigran yg dibina 30 KK;	Jumlah lokasi transmigrasi yang di monev 2 LOKASI;	Dukungan 18,41% Jumlah KK transmigran yg dibina sebesar 30 KK	94.750.000							
45	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Lokal	Jumlah KK transmigran yg dibina	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Kecamatan: SAGARANTEN, Desa/Kelurahan: SAGARANTEN ; Kecamatan: CIDOLOG, Desa/Kelurahan: CIDOLOG ; Kecamatan: LENGKONG, Desa/Kelurahan: LENGKONG ; Kecamatan: CIEMAS, Desa/Kelurahan: CIEMAS. ;	Jumlah KK transmigran yg dibina 30 KK;	Jumlah masyarakat transmigrasi lokal yang terbina 5 LOKASI;	Dukungan 37,83% Jumlah KK transmigran yg dibina sebesar 30 KK	194.760.000							
46	Penggerakan dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan 20 KK	Jumlah transmigrasi yang akan dikirim ke luar pulau Jawa 5 KK;	Dukungan 17,45% Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan sebesar 25 KK	85.825.000							
47	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan 20 KK	Jumlah MoU Kerjasama antar wilayah transmigrasi 1 Naskah MoU;	Dukungan 12,84% Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan sebesar 25 KK	66.090.000							
48	Sosialisasi Transmigrasi	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan	Meningkatnya jumlah transmigran yang diberangkatkan dan terbinanya transmigran dan translok	Kecamatan: CICANTAYAN, Desa/Kelurahan: CICANTAYAN. ;	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan 20 KK	Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi 200 Orang;	Dukungan 13,48% Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan sebesar 25 KK	69.370.000							
<b>JUMLAH APBD</b>											14.041.918.600				
<b>JUMLAH APBD PROVINSI</b>											27.000.000.000				
<b>JUMLAH APBD + APBD PROVINSI</b>											41.041.918.600				



**Lampiran Matriks Sanding Pemetaan RKPD 2021**





PERMENDAGRI RI TAHUN 2018													
PERMENDAGRI STRUKTURKENDERAAN					PERMENDAGRI DI TAHUN 2018								
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB	KESIAMAN	INDIKATOR AGREGATIS	PROGRAM	INOVATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE
Tenaga Kerja	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Peningkatan Pengembangan Lembaga Kelembagaan	Dewan Pengawasan	Pemeriksaan penyelesaian kasus hubungan industrial	Pengawasan, Penelitian, Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Standar Hubungan-Hubungan Layak Pengkajian Kemampuan Perusahaan	Pengawasan dan Penyelidikan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Standar Kelembagaan Hidup Layak, Penelitian Kemampuan Perusahaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penelitian penyelesaian kasus hubungan industrial	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Tenaga Kerja	7 5 2 02 1
Tenaga Kerja	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Peningkatan Pengembangan Lembaga Kelembagaan	Pertemuan dan Evaluasi Sosial Pekerja	Pemeriksaan penyelesaian kasus hubungan industrial	Penyenggaraan verifikasi dan Revisi/Kelembagaan pada Organisasi Pengusaha, Trade Union dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Aman, Sehat, Pekerja	Kelembagaan, Pengawasan dan Penyelidikan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Jumlah Serikat Pekerja yang tidak terdaftar	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pemeriksaan penyelesaian kasus hubungan industrial	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Tenaga Kerja	7 5 2 02 2
Tenaga Kerja	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Peningkatan Pengembangan Lembaga Kelembagaan	Mayday Plan (Survei Nasional)	Jumlah Serikat Pekerja	Pengawasan, Penelitian, Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Jumlah Serikat Pekerja	Kelembagaan, Pengawasan dan Penyelidikan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Jumlah Serikat Pekerja yang tidak terdaftar	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penelitian penyelesaian kasus hubungan industrial	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Tenaga Kerja	7 5 2 02 3
Tenaga Kerja	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Peningkatan Pengembangan Lembaga Kelembagaan	Pertemuan dan Pembinaan Pekerja Trade Union	Jumlah Serikat Pekerja	Pengawasan, Penelitian, Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Jumlah Serikat Pekerja	Kelembagaan, Pengawasan dan Penyelidikan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Jumlah Serikat Pekerja yang tidak terdaftar	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penelitian penyelesaian kasus hubungan industrial	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Tenaga Kerja	7 5 2 02 4
Tenaga Kerja	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Peningkatan Pengembangan Lembaga Kelembagaan	UKS Tripartit	Jumlah Serikat Pekerja dan	Pengawasan, Penelitian, Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Jumlah Serikat Pekerja dan	Kelembagaan, Pengawasan dan Penyelidikan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Jumlah Serikat Pekerja yang tidak terdaftar	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penelitian penyelesaian kasus hubungan industrial	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Tenaga Kerja	7 5 2 02 5
Tenaga Kerja	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Peningkatan Pengembangan Lembaga Kelembagaan	Perluasan Kelembagaan Kerja	Jumlah Serikat Pekerja dan	Pengawasan, Penelitian, Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Jumlah Serikat Pekerja dan	Kelembagaan, Pengawasan dan Penyelidikan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogk Kerja dan Industriasi	Jumlah Serikat Pekerja yang tidak terdaftar	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penelitian penyelesaian kasus hubungan industrial	Hubungan industrial dan tingkat kerja	Tenaga Kerja	7 5 2 02 6

PERHIMPENDAGRI 80 TAHUN 2018														
PERHIMPENDAGRI 80 TAHUN 2018					PERHIMPENDAGRI 80 TAHUN 2018									
URUSAN	BIKANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR SUB	SAS NEGATIF	INDIKATOR	INDIKATOR SUB	KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIKANG URUSAN	URUSAN	KODE
Tenaga Kerja	Pemertanian Kerja	dukungan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Tenaga Kerja Penganggur Sementara	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Tenaga Kerja Penganggur Sementara	Jumlah Tenaga Kerja Penganggur Sementara	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Tenaga Kerja Penganggur Sementara	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Pemertanian Kerja	Tenaga Kerja	7 4 2.04 3
Tenaga Kerja	Pemertanian Kerja	dukungan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Peserta ITU	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Peserta ITU	Jumlah Peserta ITU	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Peserta ITU	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Pemertanian Kerja	Tenaga Kerja	7 4 2.04 3
Tenaga Kerja	Pemertanian Kerja	dukungan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Jatidiri dan kemampuan	Jumlah Perumahan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Pemertanian Kerja	Tenaga Kerja	7 4 2.03 3
Tenaga Kerja	Pemertanian Kerja	dukungan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah BUK	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah BUK	Jumlah BUK	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah BUK	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Pemertanian Kerja	Tenaga Kerja	7 4 2.01 1
Tenaga Kerja	Pemertanian Kerja	dukungan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Koordinasi dan pembinaan	Jumlah Perumahan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Pemertanian Kerja	Tenaga Kerja	7 4 2.05 1
Tenaga Kerja	Pemertanian Kerja	dukungan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Pemertanian Kerja	Tenaga Kerja	7 4 2.01 1
Tenaga Kerja	Pemertanian Kerja	dukungan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Pemertanian Kerja	Tenaga Kerja	7 4 2.04 1
Tenaga Kerja	Pemertanian Kerja	dukungan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Pemertanian Kerja	Tenaga Kerja	7 4 2.01 2
Non Urusan	Pemertanian dan Evaluasi	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Pemertanian dan Evaluasi	Non Urusan	7 3 2.01 1
Non Urusan	Pemertanian dan Evaluasi	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Pemertanian dan Evaluasi	Non Urusan	7 3 2.01 1
Transmigrasi	Transmigrasi	dukungan dan pengembangan kewirausahaan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	Jumlah Perumahan	Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah Perumahan	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Tingkat pengangguran	Transmigrasi	Transmigrasi	3 3 2 2.01 2







## BAB V PENUTUP

Dalam pelaksanaan program / kegiatan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi telah mengacu pada Renstra tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, sesuai dengan komitmen terhadap pelaksanaan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021. Begitu pula dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Awal Rencana kerja (Renja) Dinas sebagai acuannya.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2021 disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi di bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, serta mampu menyajikan kinerja yang lebih optimal.

Sukabumi, 28 Agustus 2020

Kepala  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sukabumi



**Ir. H. DADANG BUDIMAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630503 198803 1 008